

PENGARUH PENDIDIKAN, TINGKAT UPAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

COKORDA ISTRI DIAN PURNAMA YANTHI¹

A.A.I.N. MARHAENI²

¹*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: cokordadian@gmail.com*

²*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: marhaeni_agung@yahoo.com*

ABSTRAK

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk. Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) pengaruh langsung antara pendidikan, tingkat upah, dan pengangguran terhadap persentase penduduk miskin; 2) pengaruh pendidikan dan tingkat upah secara tidak langsung terhadap persentase penduduk miskin melalui pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap pengangguran dan tingkat upah berpengaruh positif terhadap pengangguran. Pendidikan dan tingkat upah berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin dan pengangguran berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin. Selain itu terdapat pengaruh tidak langsung dari pendidikan dan tingkat upah terhadap persentase penduduk miskin melalui pengangguran, dengan kata lain pengangguran merupakan variabel mediasi dalam pengaruh pendidikan dan tingkat upah terhadap persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Kata kunci : pendidikan, tingkat upah, pengangguran, persentase penduduk miskin

ABSTRACT

One of the objectives of national development is to improve the performance of the economy in order to create jobs and organize a decent life for all the people who in turn will realize the welfare of the population. One of the main indicators of the success of national development is the rate of decrease in the number of poor people. The purpose of this study was to determine: 1) direct influence between education, wages, and unemployment to the percentage of the poor; 2) the influence of education and the level of wages indirectly to the percentage of poor people through unemployment in the district / city of Bali province. This study uses secondary data analysis Path Analysis. The results showed showed that the negative effect of education on unemployment and wages positive effect on unemployment. Education and wage levels negatively affect the percentage of poor and unemployed positive effect on the percentage of poor people. In addition there is an indirect effect of education and wage levels on the percentage of poor people through unemployment, in other words, unemployment is mediating variables in the influence of education and the level of wages on the percentage of poor people in the district / city of Bali province.

Keywords : education, wages, unemployment, percentage of poor

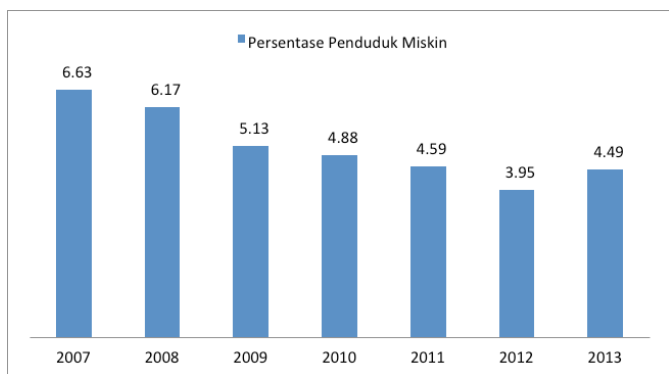
PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya

akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Sejalan dengan tujuan tersebut, khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus meningkat berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah. Kebutuhan daerah masing-masing dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dan pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas, oleh karena itu keberhasilan pembangunan nasional menjadi salah satu indikator utama untuk laju penurunan jumlah penduduk miskin (Suliswanto, 2010).

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, maupun struktural. Pandangan ini memperlihatkan luasnya cakupan tentang dimensi kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks dan bersifat multidimensional, mendorong berbagai upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, dkk, 2008). Dalam kehidupan mereka sehari-hari bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka itu sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu, baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial yang lebih tinggi.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali tahun 2007-2013

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2014

Terlihat pada Gambar 1 bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Bali periode tahun 2007-2013 mengalami fluktuasi, dimana tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 4,49 persen. Persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Bali pada periode 2007-2013 mengalami fluktuasi, Kabupaten Klungkung pada tahun 2013 memiliki persentase penduduk miskin yakni sebesar 7,01 persen. Kota Denpasar memiliki persentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 2,07 persen, ini menunjukkan usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan belum merata di seluruh kabupaten/

kota (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014).

Secara bertahap Provinsi Bali sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Pelaksanaan program-program pro-rakyat dan memberikan fasilitas yang memadai agar mampu memenuhi dan mengakses berbagai pelayanan kebutuhan masyarakat seperti halnya dalam Program JKBM, Simantri, Bedah Rumah dan lain sebagainya adalah salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. (Astrini, 2013). Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Bali bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, akan tetapi pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Provinsi Bali mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hartono dan Aziz dalam Hudaya (2009) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu: (1) Pendidikan yang terlampau rendah, (2) Malas bekerja, (3) Keterbatasan sumber alam, (4) Keterbatasan lapangan pekerjaan, (5) Keterbatasan modal, (6) Beban keluarga. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia menurut Syamrilaode (2011) antara lain: (1) Rendahnya produktivitas tenaga kerja, (2) Tingkat upah rendah, (3) Timpangnya distribusi pendapatan, (4) Kurangnya kesempatan kerja, (5) Rendahnya kualitas sumber daya alam, (6) Masih kurangnya penggunaan teknologi, (7) Etos kerja dan motivasi kerja yang rendah, (8) Kultur budaya, (9) Pembangunan ekonomi/pertumbuhan ekonomi. Semua faktor saling mempengaruhi dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang utama atau faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung.

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang bertujuan agar warga negaranya mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat ketertinggalan dan keterbelakangan suatu daerah. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan meningkatkan produktivitas orang tersebut, karena ilmu dan pengetahuan diperoleh lebih banyak. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan individu. Peningkatan pendapatan individu tersebut dapat meningkatkan konsumsi mereka, dan dapat terhindar dari kemiskinan. Pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk memperoleh keahlian maupun keterampilan untuk mengembangkan diri di dalam maupun diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro,2003).

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Setiap negara yang ingin maju, maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama karena pendidikan merupakan sarana untuk menghapus kebodohan serta kemiskinan (Wiguna, 2013). Orang miskin banyak mengalami kebodohan. Karena itu, memahami bahwa kemiskinan dapat mengakibatkan kebodohan itu penting, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan (Wijayanto, 2010). Hubungan pendidikan dengan kemiskinan sangat berpengaruh, karena semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, maka keahlian juga meningkat sehingga akan mendorong produktivitas kerja (Astrini, 2013).

Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. Pemerintah mempunyai peran aktif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agar SDM yang dihasilkan dapat menjadi sumber untuk pembangunan negara maupun daerah. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan berupa peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S1/D4 dan S2, beasiswa perguruan tinggi, dan beasiswa pada fakultas langka peminat. Program pendidikan non formal, berupa penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup dan keaksaraan fungsional (Sunusi dkk, 2014). Rata-rata lama sekolah di setiap tahunnya mengalami peningkatan di Provinsi Bali dari tahun 2007-2013. Kota Denpasar memiliki angka rata-rata paling tertinggi dari kabupaten-kabupaten lainnya yakni pada tahun 2013 angka rata-rata lama sekolah adalah 11,05 tahun, ini berarti masyarakat di Kota Denpasar sudah menjalankan wajib belajar 9 tahun tetapi tidak sampai menamatkan SMA/ sederajat karena angka rata-rata lama sekolah tidak mencapai 12 tahun (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014).

Dalam pembangunan ekonomi ada saat-saat kegagalan pemerintah membangun ekonomi, kegagalan pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan cenderung disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam mengelola laju pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pemerintah dalam mengatur sistem pemberian upah padahal upah adalah sumber penghasilan, bila sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga pasti mempengaruhi tingkat kemiskinan. Para pekerja menjadi salah satu pendorong gagalnya pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan (Yudha, 2013).

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,

atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran adalah tingkat upah, jika dilihat dari pihak pemberi pekerjaan upah adalah beban perusahaan dimana penambahan upah minimum dapat menyebabkan pengurangan dalam permintaan tenaga kerja (Sirait, 2013).

Upah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, timbulnya pengangguran karena meningkatnya upah minimum akan menurunkan permintaan tenaga kerja, sedangkan dari pihak tenaga kerja upah adalah upah yang seharusnya diterima sebagai balas jasa dari waktu dan tenaga. (Mankiw, 2000: 140).

Pengangguran menjadi masalah setiap negara, bahkan negara maju terlebih lagi di negara sedang berkembang seperti Negara Indonesia. Menurut Sri Budhi (2008) negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara sedang berkembang maupun negara maju senantiasa menghadapi masalah pengangguran, perbedaannya negara berkembang negaranya yang menganggur tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga, sedangkan negara maju mampu memberikan tunjangan. Berbagai cara mengatasi permasalahan ini sudah ditempuh oleh pemerintah, namun masalah ini belum mampu untuk diselesaikan. Pengangguran sangat berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan dan politik karena itu sangat penting untuk diperhatikan mengenai masalah pengangguran. (Cang dan Wu, 2012:4).

Pengangguran didefinisikan adalah seseorang yang digolongkan kedalam angkatan kerja dan mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu secara aktif, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004). Dampak buruk pengangguran berdampak terhadap perekonomian, seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak maksimalnya kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan pajak pemerintah menurun sehingga akan menghambat pembangunan ekonomi. Pengangguran berdampak terhadap masyarakat seperti menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan. Pengangguran menyebabkan menurunkan keterampilan dan pengangguran menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial (Nanga, 2005). Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Jika masyarakat tidak menganggur dan memiliki penghasilan, penghasilan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan mereka untuk hidup. Jika kebutuhan hidupnya telah terpenuhi, sehingga tidak akan miskin, dan diharapkan tingkat pengangguran menjadi rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan pun akan semakin rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh pendidikan, tingkat upah, dan tingkat pengangguran terhadap persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh pendidikan dan tingkat upah terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung pendidikan dan tingkat upah terhadap persentase penduduk miskin melalui tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, yang meliputi seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem dan Kota Denpasar. Dipilihnya Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian ini karena dari data yang diperoleh persentase penduduk miskin pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali berfluktuasi, dan terdapat perbedaan persentase penduduk miskin yang jauh antara kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Objek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu Pendidikan, Tingkat Upah, Tingkat Pengangguran dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan didukung oleh data primer.

- 1) Data sekunder adalah data berupa laporan tahunan yang diolah, disusun dan diterbitkan oleh lembaga atau instansi terkait sehingga dapat digunakan untuk analisis data (Sugiyono, 2012:129), contohnya yaitu: data Pendidikan, Tingkat Upah, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.
- 2) Data primer adalah data yang di dapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, contohnya yaitu: untuk memahami secara mendalam mengenai pendidikan, tingkat upah, tingkat pengangguran dan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Metode observasi non-partisipan, yaitu teknik

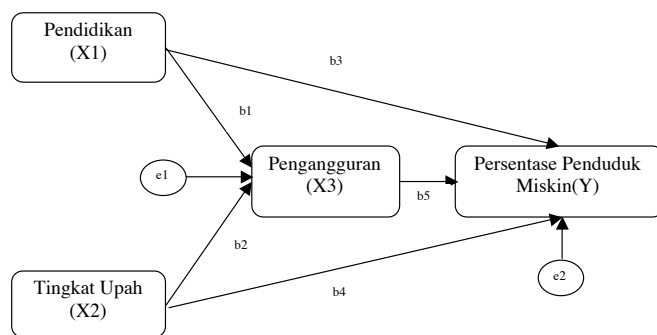
pengumpulan data dengan observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2012:14). Dalam penelitian ini data yang didapatkan melalui observasi non-partisipan antara lain: data pendidikan, tingkat upah, tingkat pengangguran dan kemiskinan.

- 2) Wawancara mendalam dari berbagai sumber seperti Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengamati, dan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali terkait dengan penelitian ini dan menganalisis data-data mengenai pendidikan, tingkat upah, dan pengangguran yang berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Teknik Analisis Data

Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, untuk mengira hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Suyana Utama, 2012). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen serta hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening.



Gambar 2. Diagram Jalur Penelitian

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

$$X_3 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 X_3 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan

X₁ = Pendidikan

X₂ = Tingkat Upah

X₃ = Pengangguran

β₁, β₂, β₃, β₄, β₅= Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

e₁, e₂ = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan - hubungan antar variabel penelitian, yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur (*path*) (Suyana Utama, 2012). Model tersebut juga dapat dinyatakan sebagai berikut :

Persamaan Struktural 1

$$X_3 = -0.536X_1 + 0.336X_2 + e_1$$

Persamaan Struktural 2

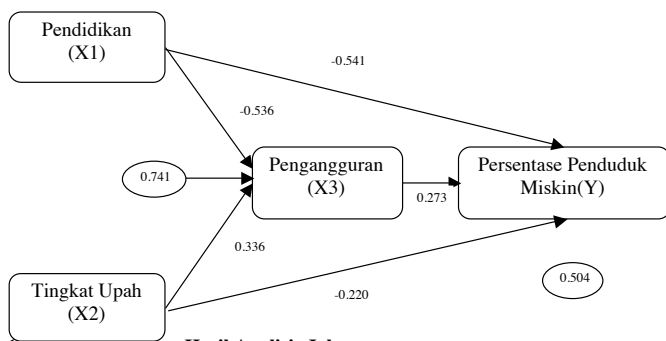
$$Y = -0.541X_1 - 0.220X_2 + 0.273X_3 + e_2$$

Tabel 1. Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikan Antarvariabel

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	T. Hitung	P. Value	Keterangan
X1 → X3	-0.536	0.088	-5.544	0.000	Signifikan
X2 → X3	0.336	0.556	3.472	0.001	Signifikan
X1 → Y	-0.541	0.117	-6.511	0.000	Signifikan
X2 → Y	-0.220	0.677	-2.910	0.005	Signifikan
X3 → Y	0.273	0.130	3.246	0.002	Signifikan

Sumber: Data Diolah, 2015

Tabel 1 mendeskripsikan bahwa pendidikan (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran (X_3), sedangkan tingkat upah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran (X_3). Pendidikan (X_1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin (Y), tingkat upah (X_2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin (Y) sedangkan pengangguran (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin (Y). Berdasarkan ringkasan koefisien jalur Tabel 1 maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Diagram Hasil Analisis Jalur

Hasil Penelitian, (2015)

Variabel pendidikan memiliki nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0.536 dan nilai probabilitas sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$ artinya Pendidikan (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Pengangguran (X_3). Hubungan negatif antara variabel Pendidikan terhadap Pengangguran yang diperoleh dalam penelitian ini, didukung oleh penelitian Sirait (2013) dalam penelitiannya menyatakan variabel Pendidikan berpengaruh negatif mempengaruhi variabel Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Peningkatan tingkat pendidikan akan menurunkan tingkat pengangguran. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang terus ditingkatkan lagi agar kualitas sumberdaya manusia di Bali semakin berkualitas dan mempunyai daya saing.

Temuan tersebut disampaikan juga oleh Ibu Luh Made Wiratmi, SE. Msi selaku Kepala Bagian Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja bertempat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali pada tanggal 22 Juni 2015, selengkapnya hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“Selain meningkatkan mutu pendidikan formal guna menurunkan pengangguran, pemerintah selaku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali berupaya menurunkan tingkat pengangguran melalui pendidikan informal dengan melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan pelatihan pemerintah dan swasta, bekerja sama sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri, karena Bali bergerak di sektor pariwisata maka yang disiapkan adalah tenaga kerja di sektor pariwisata contohnya tenaga kerja kapal pesiar dan hotel. Mencari peluang-peluang kerja yang ada sesuai kebutuhan pasar dan melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar juga.”

Variabel Tingkat Upah memiliki nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.336 dan nilai probabilitas sebesar $0.001 < 0,05$ ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya Tingkat Upah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran (X_3). Hubungan positif antara variabel Tingkat Upah terhadap Pengangguran yang diperoleh dalam penelitian ini, didukung oleh penelitian Kurniawan (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel Tingkat Upah mempengaruhi pengangguran di Kabupaten Gresik. Penelitian Alghofari (2010) menyatakan bahwa variabel Tingkat Upah berpengaruh positif mempengaruhi Pengangguran di Indonesia. Kenaikan besaran tingkat upah akan berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran, hubungan searah ini disebabkan ketika pemerintah menaikkan upah minimum maka kenaikan penawaran tenaga kerja meningkat, akan tetapi perusahaan lebih memilih mengurangi jumlah pekerja agar tidak mengalami defisit, sehingga pengangguran pun meningkat seiring kenaikan upah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Temuan tersebut disampaikan juga oleh Ibu Luh Made Wiratmi, SE. Msi selaku Kepala Bagian Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja bertempat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali pada tanggal 22 Juni 2015, selengkapnya hasil wawancara tersebut adalah

sebagai berikut :

“Dalam penetapan pengupahan yang tidak sesuai atau melebihi kemampuan perusahaan, jika pemberian upah dipaksakan oleh perusahaan maka akan menyebabkan ketidakmampuan perusahaan memberikan upah kepada tenaga kerjanya, maka perusahaan akan mengurangi operasional pegawai. Pengurangan operasional pegawai karena perusahaan yang tidak mampu memberi upah minimum kepada tenaga kerja akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Pemerintah selaku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali memberikan pelatihan-pelatihan, pelatihan yang bekerja sama dengan pelatihan pemerintah dan pelatihan swasta, bekerja sama sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri.”

Variabel pendidikan memiliki nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0.541 dan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0,05$ ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya Pendidikan (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin (Y). Hubungan negatif antara variabel Pendidikan terhadap Persentase Penduduk Miskin yang diperoleh dalam penelitian ini didukung oleh penelitian Wiguna (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel pendidikan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan meningkatnya pendidikan akan menurunkan angka kemiskinan, dimana pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Seorang yang miskin mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi, maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Akan tetapi, pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan, orang miskin tidak mempunyai kecukupan dana untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi, seperti sekolah lanjutan dan universitas. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Astrini A. (2013) juga menyatakan pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Temuan tersebut disampaikan juga oleh bapak Ketut Budiawan selaku Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bali pada tanggal 18 Juni 2015, selengkapnya hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“Pendidikan sangat penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah selaku Dinas Sosial Provinsi Bali memberikan bantuan yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) yang mana salah satunya pemberian bantuan pendidikan dasar bagi masyarakat miskin, dengan tujuan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yang kurang mampu untuk menunjang kebutuhan sehari-harinya agar bisa menekan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.”

Variabel tingkat upah memiliki nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0.220 dan nilai probabilitas sebesar $0.005 < 0,05$ ini berarti H_0 ditolak H_1

diterima, artinya Tingkat Upah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin (Y). Hubungan negatif antara variabel Tingkat Upah terhadap Persentase Penduduk Miskin dalam penelitian ini didukung oleh penelitian Prastyo (2010) dalam penelitiannya menyatakan variabel tingkat upah mempengaruhi kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Menurut Alkautsar (2014) dalam penelitiannya menyatakan variabel Tingkat Upah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kesejahteraan buruh/pekerja disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan buruh/pekerja sehingga tingkat kesejahteraan buruh/pekerja tersebut meningkat. Kesejahteraan yang meningkat menyebabkan produktivitas kerja meningkat dan keuntungan perusahaan menjadi bertambah. Kenaikan UMP tersebut akan menguntungkan pihak buruh/pekerja dan pengusaha karena adanya produktivitas kerja yang meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Temuan tersebut disampaikan juga oleh bapak Ketut Budiawan selaku Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bali pada tanggal 18 Juni 2015, selengkapnya hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“Kemiskinan menurun jika diimbangi dengan kenaikan tingkat upah. Semakin tinggi upah akan memicu penurunan tingkat kemiskinan. Masyarakat yang menerima upah yang layak dan dapat memenuhi kebutuhannya akan tidak mengalami kesulitan ekonomi, yang mana semakin banyak masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya akan terjauhi oleh kemiskinan itu sendiri. Kenaikan upah juga dilihat dari kemampuan perusahaan dan tidak mengesampingkan kesejahteraan pekerja, agar kemiskinan bisa semakin ditekan.”

Variabel pengangguran memiliki nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.273 dan nilai probabilitas sebesar $0.002 < 0,05$ ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya Pengangguran (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin (Y). Hubungan positif antara variabel Pengangguran terhadap Persentase Penduduk Miskin yang diperoleh dalam penelitian ini didukung oleh penelitian Wiguna (2013) menyatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Menurut Astrini (2013) juga menyatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Hal ini berarti meningkatnya pengangguran akan berdampak pada peningkatan persentase penduduk miskin. Dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Temuan tersebut disampaikan juga oleh bapak Ketut Budiawan selaku Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bali pada tanggal 18 Juni 2015, selengkapnya hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“Pemerintah selaku Dinas Sosial Provinsi Bali sudah menjalankan program-program untuk menurunkan pengangguran guna menurunkan kemiskinan. Salah satu program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yaitu pemberdayaan penduduk miskin dengan pemberian modal usaha untuk memfasilitasi kelompok warga/keluarga miskin yang telah diwadahi didalam KUBE, untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, demi terjauhi dari kemiskinan.”

Pengaruh Tidak Langsung

Berdasarkan Uji Sobel didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Sobel

Hubungan Variabel	Variabel Mediasi	Ab	S _{ab}	Z hitung	Keterangan
X ₁ → Y	X ₃	0.1463	0.074	1.9863	Signifikan
X ₂ → Y	X ₃	0.0917	0.042	2.1654	Signifikan

Sumber : Data Diolah, 2015

Tabel 2 mendeskripsikan bahwa Pendidikan (X₁) berpengaruh tidak langsung terhadap Persentase Penduduk Miskin (Y) melalui Pengangguran (X₃) dengan hasil z hitung sebesar 1.9863 > 1.96. Tingkat Upah (X₂) berpengaruh tidak langsung terhadap Persentase Penduduk Miskin (Y) melalui Pengangguran (X₃) dengan hasil z hitung sebesar 2.1654 > 1.69.

Pengaruh tidak langsung Pendidikan terhadap Persentase Penduduk Miskin melalui Pengangguran dan pengaruh tidak langsung Tingkat Upah terhadap Persentase Penduduk Miskin melalui Pengangguran adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui Pengangguran X3 (b1 x b5) dan (b2 x b5)	Pengaruh Total
X1 → X3	-0.536	-	-0.536
X2 → X3	0.336	-	0.336
X1 → Y	-0.541	-0.146	-0.687
X2 → Y	-0.220	0.092	-0.128
X3 → Y	0.273	-	0.273

Sumber : Data Diolah, 2015

Pengaruh tidak langsung Pendidikan (X₁) melalui Pengangguran (X₃) terhadap Persentase Penduduk Miskin (Y) adalah sebesar 0,146. Pengaruh tidak langsung Tingkat Upah (X₂) melalui Pengangguran (X₃) terhadap Persentase Penduduk Miskin (Y) adalah sebesar 0,092.

Variabel pengangguran (X₃) merupakan variabel

memediasi secara parsial, mediasi parsial terjadi jika variabel bebas dalam penelitian berpengaruh signifikan terhadap variabel intervening dan variabel terikat, pada penelitian ini variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin, variabel tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin, dan variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, variabel tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pendidikan dan tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Bali, dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
2. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali, dan tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali.
3. Pendidikan dan tingkat upah berpengaruh secara tidak langsung terhadap persentase penduduk miskin melalui pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali. Variabel pengangguran merupakan variabel mediasi parsial.

Saran

1. Pemerintah lebih memperhatikan dibidang pendidikan seperti memberikan fasilitas pendidikan gratis, dan memfokuskan beasiswa untuk kalangan tidak mampu. Pemerintah harus lebih memfokuskan bagi kalangan yang sangat membutuhkan.
2. Dalam penentuan upah minimum regional, pemerintah jangan hanya fokus untuk meningkatkan upah minimum tersebut, akan berdampak meningkatnya pengangguran karena pihak memberi upah merasa keberatan dan akan mengurangi jumlah pekerjaanya. Di Provinsi Bali upah minimum regional setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebaiknya pemerintah lebih mempertimbangkan kebijakan kenaikan upah minimum regional, sehingga perusahaan tidak keberatan akan penetapan upah minimum regional. Menekan peningkatan jumlah pengangguran akan menurunkan jumlah kemiskinan karena pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
3. Peningkatan jumlah angkatan kerja sebaiknya diimbangi dengan kesempatan kerja yang lebih banyak. Mengadakan pembangunan di sektor informal seperti *home industry*. Selain itu memberikan pelatihan kerja untuk mencari kerja atau membuka

lapangan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja akan menekan pengangguran dan kesejahteraan pekerja meningkat akan terjauhi dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia. *Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Alkautsar, Masyithoh. 2014. Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia. *Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor*.
- Astrini, A. Ni Made Myanti dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *e- jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Udayana. Vol. 2, No. 8*.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Bali Dalam Angka. BPS Provinsi Bali.
- Cang, Juin-jen dan Chi-Hsin Wu. 2012. Crime, Job Searches, and Economic Growth, *International Atlantic Economic Society*, pp:1-20
- Kurniawan, Aditya Barry. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Nasir, Muh M. Saichudin dan Maulizar. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Jakarta: Lipi*.
- Prastyo, Adit Agus. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Sirait, Novlin. 2013. Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. E-Jurnal EP Unud, Vol. 2, No 2 : 108-118*
- Sri Budhi, Made Kembar. 2008. Mengelola Sumber Daya Manusia Menyongsong Millenium Development Goals (MDGs). *Jurnal Ekonomi dan Sosial, h: 82-85*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyuni. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8 No. 2*. Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Suyana Utama, Made. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Todaro, Micheal and Stephen Smith. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Erlangga : Jakarta.
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Wiguna, Van Indra. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.